

SISTEM PENGELOLAAN TRANSPARASI DANA BERGULIR MASYARAKAT (DBM) MELALUI KEGIATAN SURVEI UMKM DI BUMDESMA ARTHA MAKMUR KEJAYAN

Sugi Indaningsih*, Ammah Fazizah

Universitas Yudharta Pasuruan

Correspondent Author Email*: indha01107@gmail.com

Abstract

The Community Revolving Fund Program serves as a source of capital for village micro and small businesses; however, its management at BUMDesma Artha Makmur Kejayan faced challenges because the data collection relied solely on written proposals without field verification, leading to information discrepancies, identity misuse, and weak business monitoring. This community service activity aimed to improve transparency and data accuracy by conducting direct surveys on all funded business actors. The method involved field observation, structured interviews, and business documentation to verify borrower identity, business existence, and capital development. The results indicate a significant improvement in data accuracy, increased borrower transparency, and clearer mapping of active and inactive businesses. The updated database produced through this activity now serves as a reference for BUMDesma to enhance evaluation and build a more sustainable management system. In conclusion, the UMKM survey proved effective in strengthening transparency and accountability, ensuring that the Community Revolving Fund Program is managed more professionally and reaches the right beneficiaries.

Keywords: Community Revolving Fund, Micro and Small Businesses, Field Survey, Transparency

Abstrak

Program Dana Bergulir Masyarakat berperan sebagai sumber permodalan bagi pelaku UMKM desa, namun pengelolaannya di BUMDesma Artha Makmur Kejayan masih terkendala karena pendataan hanya berbasis proposal tanpa verifikasi sehingga muncul ketidaksesuaian informasi, penyalahgunaan identitas peminjam, dan lemahnya pemantauan usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan transparansi dan ketepatan data UMKM melalui pelaksanaan survei langsung terhadap seluruh penerima modal. Metode yang diterapkan meliputi observasi lapangan, wawancara terstruktur, dan dokumentasi usaha untuk memeriksa identitas peminjam, keberadaan usaha, serta perkembangan penggunaan modal. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi data, keterbukaan peminjam, serta pemetaan status usaha aktif dan tidak aktif. Basis data baru yang dihasilkan menjadi acuan bagi BUMDesma untuk memperkuat evaluasi dan penyusunan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Kesimpulannya, survei UMKM terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sehingga pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat dapat berjalan lebih profesional dan tepat sasaran.

Kata Kunci: Dana Bergulir Masyarakat, UMKM, Survei Lapangan, Transparansi

Copyright©2025. Sugi Indaningsih & Ammah Fazizah
This is an open access article under the CC-BY NC-SA license.
DOI: <https://doi.org/10.30656/3mbhmr66>

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa merupakan salah satu fokus utama pembangunan di Indonesia, khususnya dengan memberikan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berperan sebagai penggerak ekonomi lokal. Agar sektor ini semakin kuat, pemerintah merancang sejumlah program pembiayaan yang disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes dan BUMDesma). Salah satu programnya adalah Dana Bergulir Masyarakat (DBM), yang bertujuan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menguatkan kemandirian ekonomi di desa.

Di wilayah Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, BUMDesma Artha Makmur merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan program DBM. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan perbincangan dengan pengurus BUMDesma, terdapat sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan DBM. Pertama, ketidakjelasan peminjam mengenai kemajuan usaha dan penggunaan dana yang diterima, menyebabkan pihak BUMDesma mengalami kesulitan dalam menilai apakah dana tersebut digunakan sesuai dengan proposal dan apakah usaha masih berjalan. Kedua, data UMKM yang menerima DBM tidak pernah diperbarui melalui survei lapangan, tetapi hanya bergantung pada proposal awal yang diajukan oleh peminjam. Situasi ini mengakibatkan ketidak seimbangan informasi antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan, sehingga menghambat proses pemantauan dan evaluasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020:113), data UMKM yang tidak diperbarui dapat mengakibatkan penurunan kualitas pengambilan keputusan, karena pengelola tidak memiliki informasi yang tepat tentang keadaan usaha yang menerima bantuan.

Berdasarkan masalah tersebut, tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah meningkatkan kejelasan dan ketepatan data pengelolaan DBM melalui pelaksanaan survei UMKM secara langsung. Survei ini dilaksanakan untuk memperbarui informasi tentang profil usaha penerima dana, memeriksa keadaan usaha di lapangan, mengidentifikasi kemajuan atau hambatan yang dihadapi usaha, serta mencocokkan data proposal dengan situasi nyata peminjam. Tujuan lainnya adalah memberikan saran

mengenai sistem pencatatan yang lebih teratur kepada BUMDesma supaya proses pemantauan dan pelaporan dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan.

Solusi yang diberikan untuk menangani masalah tersebut adalah dengan melaksanakan survei lapangan yang mendalam dan terencana, menyusun database UMKM terkini, serta memberikan saran perbaikan terhadap sistem transparansi dan pelaporan kepada BUMDesma. Survei dilaksanakan dengan metode partisipatif, yang melibatkan mahasiswa, pengurus BUMDesma, serta para peminjam dana, sehingga pengumpulan data dapat dilakukan dengan lebih transparan dan objektif. Survei ini berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi penggunaan dana dan juga sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengelolaan DBM yang lebih akuntabel.

Secara teoritis, aktivitas ini didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Sari dan Yulianti (2022:78) menyatakan bahwa transparansi dalam program pemberdayaan ekonomi desa harus diwujudkan melalui pengungkapan informasi, pencatatan yang tepat, serta penyampaian laporan yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Selain itu, teori pemantauan program pemberdayaan masyarakat menekankan bahwa pembaruan data secara rutin adalah kunci keberhasilan suatu program, terutama yang melibatkan dana bergulir (Fadillah, 2021:90). Oleh karena itu, kegiatan survei UMKM ini memiliki dasar teoritis yang kokoh sebagai cara untuk meningkatkan mutu pengelolaan DBM di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BUMDesma Artha Makmur Kejayan. Dengan pembaruan data UMKM, BUMDesma dapat melakukan pemantauan dengan lebih efisien, meningkatkan ketepatan sasaran program, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan DBM. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya pengelolaan lembaga desa yang lebih profesional dan berkelanjutan. Bagi peminjam, peningkatan keterbukaan informasi juga dapat membantu mereka dalam mendapatkan bimbingan yang lebih sesuai dengan keadaan usaha mereka. Akhirnya, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap peningkatan kemandirian ekonomi desa dengan cara pengelolaan DBM yang lebih akurat, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui teknik survei lapangan, observasi langsung, dan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM yang menerima Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di BUMDesma Artha Makmur Kejayan. Pendekatan kualitatif dipilih karena kegiatan ini menekankan pada verifikasi data, pemahaman keadaan usaha secara nyata, serta pengumpulan informasi mengenai transparansi peminjam secara langsung, seperti yang disarankan dalam evaluasi program pemberdayaan yang berbasis masyarakat (Sari, 2021: 92).

Proses pengabdian dimulai dengan melakukan koordinasi bersama pengurus BUMDesma untuk mendapatkan daftar awal UMKM, yang kemudian diikuti dengan penyusunan instrumen survei serta panduan wawancara. Selanjutnya, mahasiswa melakukan survei lapangan dengan mengunjungi setiap UMKM untuk mencocokkan data proposal dengan keadaan usaha yang sesungguhnya, memverifikasi identitas peminjam, serta mengumpulkan informasi tentang penggunaan dan perkembangan dana DBM. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara selanjutnya akan dirangkum, dianalisis, serta disusun menjadi database baru yang lebih tepat guna, yang akan diserahkan kepada BUMDesma sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem pencatatan. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi secara langsung penyalahgunaan data peminjam serta ketidaksesuaian informasi dalam proposal dengan keadaan nyata di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sistem Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Sebelum Survei

Sebelum pelaksanaan survei terhadap UMKM, sistem pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di BUMDesma Artha Makmur Kejayan berjalan melalui prosedur administratif yang menekankan pada kelengkapan proposal sebagai landasan untuk menentukan kelayakan pencairan dana. Proses pengajuan pinjaman dilakukan secara individu melalui kelompok peminjam, dan jika proposal dianggap lengkap, dana dapat dicairkan langsung kepada peminjam yang bersangkutan. Walaupun demikian, kelayakan usaha sepenuhnya ditentukan oleh informasi tertulis dalam proposal tanpa adanya

pengecekan secara langsung terkait keberadaan usaha, kegiatan ekonomi, atau kemampuan peminjam untuk menjalankan usaha yang diajukan.

Ketergantungan terhadap proposal mengakibatkan BUMDesma belum memperoleh informasi yang tepat mengenai keadaan usaha peminjam. Tipe usaha, tempat, aset yang digunakan untuk produksi, frekuensi kegiatan usaha, serta catatan pengelolaan modal tidak dapat ditentukan secara empiris karena tidak ada survei atau pengamatan langsung di lokasi usaha sebelum dana dicairkan. Sebagai akibatnya, pengumpulan data UMKM bersifat tetap dan hanya mengandalkan informasi yang diterima pada saat pengajuan awal. Perubahan dalam dinamika bisnis—termasuk kemajuan, penurunan, atau penghentian usaha—tidak dicatat dengan cara yang sistematis.

Tidak adanya survei lapangan sebelum penyaluran dana juga memengaruhi aspek transparansi. BUMDesma kekurangan informasi yang cukup untuk menilai kesesuaian antara dana yang disalurkan dan kapasitas usaha peminjam. Selain itu, tanpa adanya verifikasi di lapangan, risiko munculnya kesalahan dalam penggunaan dana atau ketidaksesuaian informasi usaha akan meningkat. Secara umum, sistem DBM sebelum dilakukan survei dapat dianggap sebagai sistem administratif yang berfungsi dengan baik dalam proses penyaluran dana. Namun, sistem ini belum dilengkapi dengan alat verifikasi yang cukup untuk memastikan keakuratan data peminjam dan pertanggungjawaban program.

Masalah Utama yang Ditemukan

Melalui survei yang dilakukan di 17 desa penerima Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di Kecamatan Kejayan, ada beberapa masalah utama yang tidak terlihat oleh BUMDesma sebelumnya. Hal ini karena pengumpulan data hanya berdasarkan proposal tanpa pemeriksaan langsung. Masalah paling besar adalah penyalahgunaan data peminjam atau praktik meminjam atas nama orang lain. Ini terjadi ketika dana DBM diajukan menggunakan nama seseorang yang terdaftar di kelompok, tetapi uang itu digunakan oleh orang lain yang tidak terdaftar dalam dokumen. Situasi ini menciptakan perbedaan antara data administrasi dan kenyataan di lapangan, yang mengakibatkan risiko gagal bayar,

tanggung jawab yang tidak sesuai, serta beban finansial dan sosial bagi pemilik nama yang terdaftar.

Praktik meminjam atas nama orang lain ini biasanya terjadi di kelompok besar yang tidak memiliki kontrol internal yang ketat. Beberapa ketua kelompok melaporkan kesulitan dalam menagih kembali uang yang dipinjam karena pemilik dana yang sebenarnya bukanlah anggota yang terdaftar. Akibatnya, banyak kelompok mengalami masalah pengembalian yang tinggi, dan risiko kredit tidak dapat dinilai dengan baik oleh BUMDesma. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengecekan identitas sangat lemah dan anggota kelompok kurang memahami tanggung jawab mereka sebagai peminjam dalam program DBM.

Permasalahan kedua adalah ketidakcocokan antara data proposal dan situasi di lapangan, yang disebabkan karena BUMDesma sebelumnya tidak melakukan survei secara rutin. Banyak informasi tentang UMKM dalam proposal tidak sesuai dengan bisnis yang ada sekarang. Survei menunjukkan beberapa ketidakcocokan, seperti usaha yang sudah tidak beroperasi namun masih terdaftar sebagai penerima dana, perubahan jenis usaha yang tidak dicatat, sampai adanya penerima dana yang sebenarnya tidak memiliki usaha sama sekali. Selain itu, ada pula UMKM yang telah mengalami perkembangan yang signifikan tetapi tidak terdaftar dalam database, sehingga potensi keberhasilan mereka tidak pernah terpantau dan tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya.

Kedua permasalahan tersebut menegaskan bahwa sistem pendataan DBM belum cukup baik dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya di lapangan. Tanpa adanya proses verifikasi dan pembaruan data yang berkala, BUMDesma kesulitan untuk mengevaluasi kelayakan pinjaman, memetakan risiko kredit, serta memastikan pengelolaan dana berjalan secara transparan.

Pelaksanaan Survei dan Standar Verifikasi Lapangan UMKM

Pelaksanaan survei terhadap UMKM dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan kevalidan data penerima Dana Bergulir Masyarakat (DBM). Survei dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai keberadaan usaha, aktivitas operasional, serta penggunaan dana modal berdasarkan situasi nyata di lapangan. Tiga metode utama

untuk mengumpulkan data diterapkan secara bersamaan, yaitu pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Pertama, pengamatan di lapangan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung tempat usaha peminjam untuk mengidentifikasi kesesuaian antara informasi dalam proposal dengan kegiatan usaha yang sebenarnya. Surveyor mencatat beberapa elemen krusial seperti tipe usaha, peralatan produksi, kegiatan penjualan, dan kesinambungan usaha. Pengamatan ini menjadi landasan untuk menjamin bahwa usaha yang tercantum dalam proposal benar-benar eksis dan masih aktif.

Kedua, wawancara terstruktur dilaksanakan secara langsung dengan peminjam yang merupakan pemilik usaha, bukan melalui perantara atau anggota kelompok lainnya. Soal wawancara dirancang untuk mendapatkan informasi tentang profil bisnis, pemanfaatan modal, pertumbuhan bisnis setelah menerima dana, kendala yang dihadapi, serta komitmen dalam pengembalian. Wawancara dilakukan selama jam buka usaha—biasanya antara pukul 08. 00 hingga 17. 00—agar surveyor bisa memverifikasi kondisi usaha ketika berada dalam keadaan aktif. Selain itu, proses verifikasi identitas dilakukan untuk memastikan bahwa nama yang terdaftar sebagai peminjam adalah orang yang benar-benar menjalankan usaha tersebut.

Ketiga, pencatatan dilakukan dengan cara yang sederhana sebagai bukti visual yang memperkuat hasil pengamatan dan wawancara. Dokumentasi yang diperlukan hanya terdiri dari foto peminjam bersama usaha di lokasi usaha yang sesungguhnya. Gambar ini digunakan sebagai bukti visual keberadaan bisnis serta untuk mencegah penyalahgunaan informasi identitas peminjam oleh pihak lain. Jika pada waktu survei usaha tidak sedang berjalan atau telah tutup, surveyor tetap memotret lokasi usaha untuk mendokumentasikan temuan tersebut dengan tepat.

Untuk memastikan keseragaman serta akurasi data, seluruh surveyor harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) survei, yang mencakup: (1) wawancara harus dilakukan langsung kepada pemilik usaha; (2) survei harus dilaksanakan selama jam operasional usaha; (3) setiap pertanyaan harus dicatat dalam formulir survei; (4) lokasi usaha harus diverifikasi secara fisik; dan (5) dokumentasi berupa foto peminjam bersama dengan usaha harus dikumpulkan sebagai bukti akhir. Dengan adanya SOP ini, proses

survei dilakukan dengan cara yang teratur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun berdasarkan data.

Pelaksanaan survei dan verifikasi lapangan ini pada akhirnya menghasilkan informasi mengenai UMKM yang lebih tepat dan mendalam dibandingkan dengan data yang berasal dari proposal administrasi. Selain itu, mekanisme lapangan ini menciptakan sistem basis data terkini yang dapat dimanfaatkan oleh BUMDesma untuk mengevaluasi program, menganalisis risiko kredit, serta merumuskan kebijakan untuk penyempurnaan sistem DBM di masa mendatang.



Gambar 1. Wawancara dengan ketua kelompok DBM di desa Patebon DBM

Gambar 2. Dokumentasi foto verifikasi anggota DBM

Pemeriksaan Data UMKM Berdasarkan Desa dan Kelompok

Pemeriksaan data UMKM dilakukan untuk memetakan sebaran kelompok penerima Dana Bergulir Masyarakat (DBM) serta mengidentifikasi tingkat aktivitas usaha berdasarkan hasil survei lapangan. Berdasarkan rekapitulasi survei, hampir seluruh desa di wilayah Kecamatan Kejayan memiliki lebih dari satu kelompok peminjam DBM, dengan karakteristik dan jenis usaha yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa DBM telah terintegrasi cukup kuat dengan struktur sosial masyarakat melalui organisasi keagamaan dan kemasyarakatan seperti Muslimat, Fatayat, PKK, Arisan, dan pengajian rutin.

Hasil survei menunjukkan bahwa desa dengan jumlah kelompok terbanyak antara lain Dusun Patebon, Dusun Sladi, Dusun Cobanjoyo, dan Dusun Kedemungan. Sebagian besar kelompok di desa-desa tersebut masih aktif menjalankan kegiatan usaha, namun ditemukan pula beberapa kelompok yang sudah tidak berjalan secara optimal karena usaha anggotanya berhenti atau mengalami penurunan produktivitas. Sementara itu, desa seperti

Dusun Wangkal Wetan dan Dusun Linggo memiliki jumlah kelompok yang relatif lebih sedikit, namun masih mempertahankan tingkat aktivitas usaha yang stabil berdasarkan hasil survei.

Dari perspektif jenis usaha, pola yang tampak menunjukkan bahwa usaha perdagangan kecil (warung kelontong, jajanan rumahan, dan toko kebutuhan sehari-hari) merupakan jenis usaha paling dominan di hampir semua desa. Selain itu, usaha makanan dan minuman siap konsumsi, seperti jajanan basah, catering rumahan, dan penjualan gorengan, juga menjadi pilihan usaha yang cukup banyak dijalankan terutama pada kelompok Fatayat, PKK, dan Muslimat. Jenis usaha non-perdagangan seperti jahit, kerajinan, serta penjualan produk kecantikan dan fashion juga ditemukan, tetapi jumlahnya lebih sedikit dan hanya terpusat pada desa tertentu.



Gambar 3. Dokumentasi foto anggota DBM yang memiliki usaha

Berdasarkan verifikasi lapangan, UMKM yang paling aktif dan stabil berasal dari kelompok yang memiliki kegiatan sosial rutin dan tingkat solidaritas tinggi, misalnya kelompok pengajian dan organisasi perempuan. Kelompok-kelompok tersebut menunjukkan kedisiplinan lebih baik dalam bekerja sama dan saling mengingatkan terkait kewajiban pembayaran. Sementara itu, kelompok dengan jenis usaha musiman atau usaha yang tidak memiliki permintaan pasar yang stabil cenderung berisiko menghentikan operasional usahanya dan berpotensi menimbulkan kredit bermasalah di kemudian hari.

Secara keseluruhan, pemetaan UMKM berdasarkan desa dan kelompok memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi usaha di tingkat penerima DBM. Data ini menjadi dasar analisis bagi BUMDesma dalam menentukan strategi penguatan program, mulai dari pengawasan, monitoring usaha, sampai pemetaan risiko kredit per kelompok. Dengan demikian, pemeriksaan data UMKM tidak hanya memberikan informasi menyeluruh tentang persebaran usaha, tetapi juga menjadi pijakan penting untuk penyesuaian sistem DBM agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Perubahan Alur Sistem Dana Bergulir Masyarakat (DBM)



Gambar 4. Flowchart sistem Dana Bergulir Masyarakat (DBM) sebelum dilakukan Survei UMKM



Gambar 5. Flowchart sistem Dana Bergulir Masyarakat (DBM) setelah dilakukan Survei UMKM

Perubahan alur pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di BUMDesma Artha Makmur Kejayan menjadi salah satu bentuk inovasi utama dalam kegiatan pengabdian ini. Flowchart yang disusun menggambarkan perbedaan signifikan antara mekanisme lama (sebelum survei UMKM) dan sistem baru yang telah dilengkapi proses verifikasi lapangan. Pada sistem sebelumnya, proses pengajuan dana hanya mengandalkan proposal tertulis dan verifikasi administratif sederhana, sehingga banyak data tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Konsekuensinya, muncul berbagai permasalahan seperti pinjaman atas nama, usaha yang tidak benar-benar berjalan, serta lemahnya pengawasan dan pembinaan. Alur ini ditandai dengan proses verifikasi yang terbatas dan tidak adanya tahap survei, sehingga risiko kredit macet dan ketidaktepatan sasaran relatif tinggi.

Setelah dilakukannya survei UMKM, alur pengelolaan DBM mengalami perubahan fundamental melalui penambahan tahap observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan. Proses ini menghasilkan data faktual mengenai keberadaan usaha, aktivitas ekonomi, identitas peminjam, serta kesesuaian proposal dengan kondisi riil. Flowchart versi baru menunjukkan adanya sistem validasi data yang lebih komprehensif melalui integrasi informasi dari hasil survei ke dalam database digital. Dengan demikian, persetujuan pencairan dana dapat dilakukan secara lebih objektif, berbasis bukti, dan terukur. Selain itu, tahap pengawasan dan pembinaan menjadi lebih efektif karena petugas BUMDesma telah memiliki data yang lebih lengkap tentang karakteristik usaha masing-masing peminjam.

Secara keseluruhan, flowchart sebelum dan sesudah survei menggambarkan transformasi tata kelola DBM dari sistem yang bersifat administratif—dengan tingkat akurasi rendah—menjadi sistem berbasis data lapangan yang transparan dan akuntabel. Pembaruan alur ini tidak hanya meningkatkan keakuratan data peminjam, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan identitas serta meminimalkan risiko kredit bermasalah. Dengan adanya flowchart tersebut, proses pengelolaan DBM kini lebih terstruktur, jelas, dan mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat oleh BUMDesma.

Dampak Survei: Peningkatan Transparansi dan Validitas Data

Pelaksanaan survei lapangan pada seluruh kelompok DBM memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akurasi pendataan program. Survei ini berhasil menciptakan database UMKM yang jauh lebih akurat, detail, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan mengunjungi setiap UMKM secara langsung, mencatat perkembangan dan jenis usaha, serta memeriksa penggunaan dana dan identitas peminjam, tim pengabdian berhasil membuat profil UMKM yang tepat dan mudah digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan oleh BUMDesma Artha Makmur Kejayan.

satu efek paling signifikan dari survei adalah meningkatnya keterbukaan peminjam dan kelompok. Anggota kelompok sekarang menyadari bahwa data mereka diperiksa secara langsung, sehingga kemungkinan penyalahgunaan identitas dapat dikurangi. Selain itu, survei ini mendorong kelompok untuk lebih terbuka mengenai proses pinjaman, keadaan usaha, serta tantangan yang dihadapi, sehingga komunikasi antara kelompok dan BUMDesma menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain keterbukaan, survei juga meningkatkan akurasi data. Database baru yang dibuat mencakup detail tentang identitas UMKM, jenis usaha, lokasi, kegiatan terbaru, serta foto sebagai bukti fisik verifikasi. Data ini dapat mengidentifikasi UMKM yang masih beroperasi, yang tidak aktif, yang berubah usaha, atau yang sedang mengalami masalah. Dengan data yang lebih tepat, BUMDesma kini dapat melakukan analisis risiko kredit, menentukan prioritas dukungan, serta merancang strategi pengelolaan DBM yang lebih terencana.

Selain itu, kegiatan survei memberi pemahaman tentang kemungkinan dan hambatan yang ada di setiap desa. BUMDesma bisa mengetahui desa-desa yang lebih fokus pada bisnis makanan, perdagangan, atau layanan/pengolahan, sehingga pengembangan UMKM dapat lebih terarah. Contohnya, desa yang aktif di bidang makanan bisa diberi pelatihan tentang kebersihan dan pemasaran makanan, sedangkan desa yang bergerak di industri pengolahan bisa mendapatkan peralatan atau pelatihan untuk produksi.

Secara keseluruhan, kegiatan survei mempunyai pengaruh positif yang besar terhadap peningkatan kualitas pengelolaan DBM. Tingkat transparansi semakin baik, data menjadi

lebih akurat, dan kemungkinan penyalahgunaan identitas bisa diminimalisir. Dengan demikian, survei menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola DBM yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan berdasarkan data yang nyata, sehingga dapat memperbesar kemungkinan keberhasilan program di masa depan.



Gambar 6. Rapat bersama Penasehat dan Rapat Pendaanaan dengan Ketua DBM

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Indikator Keberhasilan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa program survei UMKM memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di BUMDesma Artha Makmur Kejayan. Dampak kegiatan ini tidak hanya terlihat pada aspek teknis pendataan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengendalian program, ketepatan sasaran penerima dana, serta kesiapan kelembagaan dalam melakukan pengawasan berkelanjutan. Dengan tersedianya informasi lapangan yang terverifikasi, BUMDesma memiliki dasar yang lebih kuat dalam menilai kelayakan peminjam dan meminimalkan risiko pengelolaan DBM.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini ditunjukkan oleh tercapainya sasaran utama program, yaitu tersedianya data UMKM yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan keputusan. Selain itu, keberhasilan juga terlihat dari meningkatnya kepatuhan peminjam terhadap proses verifikasi, perbaikan komunikasi antara kelompok dan pengelola DBM, serta digunakannya hasil survei sebagai acuan dalam perbaikan alur pengelolaan dana. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil meningkatkan fungsi pemantauan dan penilaian yang sebelumnya belum berjalan dengan maksimal.

Namun, evaluasi juga mengidentifikasi sejumlah indikator keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Masih terdapat UMKM yang tidak aktif atau mengalami

perubahan usaha, yang menunjukkan bahwa dinamika ekonomi masyarakat bersifat berubah-ubah dan memerlukan pemantauan secara periodik. Di sisi lain, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan survei mengakibatkan proses verifikasi belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan usaha dalam jangka panjang. Kendala tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu didukung oleh komitmen pembaruan data secara rutin agar dampak program dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan informasi teknis berupa pembaruan data UMKM, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas pengelolaan program yang dapat dinilai melalui indikator keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

Analisi Sosial - Ekonomi Kelompok

Analisis tentang kondisi ekonomi dan sosial kelompok yang menerima Dana Bergulir Masyarakat (DBM) menunjukkan bahwa keberhasilan usaha UMKM di Kecamatan Kejayan tidak hanya bergantung pada adanya modal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh karakter sosial kelompok yang mengelolanya. Kelompok-kelompok DBM yang terbentuk dari organisasi sosial dan keagamaan seperti Muslimat, Fatayat, PKK, Arisan, Pengajian, dan Jam'iyah Diba' memiliki struktur sosial yang kuat, hubungan emosional yang erat, serta norma-norma internal yang sangat penting dalam menjaga disiplin dan tanggung jawab anggotanya.

Desa dengan kelompok yang memiliki tingkat kohesi sosial yang tinggi, seperti kelompok Yasinan di Benerwojo atau Muslimat di Patebon, biasanya menunjukkan angka pengembalian yang lebih baik dan juga usaha anggotanya cenderung lebih stabil. Kekuatan solidaritas sosial membuat anggota kelompok saling memonitor dan mendukung perkembangan bisnis satu sama lain. Adanya budaya pertemuan rutin seperti majlis, pengajian, atau kegiatan PKK memberikan kesempatan bagi anggota untuk membicarakan masalah dalam usaha mereka dan mendapatkan dukungan moral dari lingkungan kelompok.

Sebaliknya, di dalam kelompok yang memiliki pergerakan anggota yang tinggi atau yang mempunyai struktur yang longgar, seperti beberapa komunitas Fatayat dan PKK di daerah Sladi dan Cobanjoyo, perkembangan ekonominya lebih beragam. Kelompok ini

mengalami perubahan usaha dengan cepat, baik dalam hal pembukaan usaha baru atau pengurangan aktivitas. Anggota yang lebih muda, yang biasanya lebih kreatif dan bisa menyesuaikan dengan peluang digital, sering berpindah jenis usaha, misalnya dari kuliner beralih ke penjualan online atau layanan kreatif lainnya. Namun, pergerakan ini juga bisa menyebabkan masalah data jika tidak ada survei yang dilakukan secara teratur.

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi rumah tangga juga memainkan peran dalam pola usaha. Kebanyakan anggota DBM adalah ibu-ibu rumah tangga dengan modal yang terbatas, sehingga jenis usaha yang mereka pilih umumnya adalah usaha kecil yang dilakukan di rumah, seperti warung sembako, masakan rumahan, jajanan, dan layanan menjahit. Pola ini menunjukkan bahwa DBM menjadi alat yang penting dalam membantu perempuan di desa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini semakin memperkuat posisi perempuan dalam ekonomi keluarga dan memperluas keterlibatan mereka dalam sektor ekonomi informal.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa beberapa desa, seperti Sumbersuko dan Kedemungan, memiliki kecenderungan untuk berbisnis di sektor pengolahan dan industri rumah. Misalnya, mereka membuat makanan olahan, kerajinan tangan, dan camilan rumahan. Desa-desa ini memiliki anggota yang memiliki keterampilan tertentu, sehingga DBM digunakan sebagai modal untuk produksi atau pembelian alat kerja. Ini menunjukkan ada potensi untuk mengembangkan nilai tambah melalui peningkatan kemampuan dalam produksi dan pemasaran.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui pelaksanaan survei Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada program Dana Bergulir Masyarakat (DBM) di BUMDesma Artha Makmur Kejayan telah memberikan sumbangan signifikan terhadap peningkatan transparansi dan ketepatan pengelolaan data peminjam. Survei lapangan yang dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara, dan pengumpulan dokumen berhasil mengonfirmasi kesesuaian data yang diajukan dalam proposal dengan keadaan usaha yang sesungguhnya, serta mengidentifikasi berbagai masalah seperti penyalahgunaan identitas peminjam, usaha yang tidak aktif, dan ketidakcocokan informasi administratif.

Kegiatan ini menghasilkan sebuah database UMKM yang baru, lebih komprehensif, valid, dan mudah dimanfaatkan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan sistem pengelolaan DBM. Di samping itu, survei ini mendorong adanya budaya akuntabilitas di antara para peminjam, sehingga proses pengawasan, pembinaan, dan penyaluran dana selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih profesional dan sesuai tujuan. Oleh karena itu, aktivitas pengabdian ini memiliki peran yang sangat berarti dalam memperkuat pengelolaan DBM, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlangsungan pemberdayaan ekonomi desa di Kecamatan Kejayan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada BUMDesma Artha Makmur Kejayan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh selama proses pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Kecamatan Kejayan dan seluruh kepala desa yang terlibat karena telah memfasilitasi akses dan memberikan izin kegiatan survei UMKM di wilayah masing-masing. Penghargaan yang sebesar-besarnya diberikan kepada seluruh ketua kelompok DBM, para pelaku UMKM, serta masyarakat setempat yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi secara terbuka sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang komprehensif. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada tim mahasiswa dan dosen pendamping yang telah bekerja sama, berkontribusi, dan berdedikasi dalam menyelesaikan kegiatan ini hingga tuntas. Semoga hasil pengabdian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan UMKM dan peningkatan transparansi pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat di Kecamatan Kejayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Wicaksono, A. (2021). *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 134–145.
- Aisyah, N., & Pratiwi, L. (2020). *Model pemberdayaan UMKM berbasis kelompok perempuan di pedesaan*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 5(1), 22–33.
- Andriani, R., & Suryanto, T. (2023). *Evaluasi efektivitas dana bergulir bagi pengembangan UMKM*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 18(1), 55–68.

- Ardiyanto, R., & Nurhadi, M. (2021). *Peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi lokal*. Jurnal Aset Desa, 2(3), 101–110.
- Astuti, W., & Handayani, R. (2020). *Analisis keberlanjutan usaha mikro berbasis rumah tangga*. Jurnal Ekonomi Mikro, 4(2), 87–95.
- Dwiyanto, A. (2022). *Good governance dalam tata kelola dana publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Febriana, T., & Mandasari, L. (2021). *Peran kelompok sosial dalam mengembangkan kewirausahaan perempuan desa*. Jurnal Sosiologi Pedesaan, 19(2), 98–109.
- Haryanto, S. (2019). *Pendekatan survei dalam penelitian sosial: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hidayati, N., & Fitriani, E. (2023). *Kendala pengembangan usaha mikro di sektor kuliner*. Jurnal UMKM Nusantara, 7(1), 12–24.
- Ikhsan, M., & Rahmawati, D. (2022). *Evaluasi program pendanaan UMKM dan dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga*. Jurnal Keuangan Publik, 9(3), 76–89.
- Kurniasari, Y., & Saputra, A. (2023). *Transformasi digital UMKM di desa dan implikasinya bagi pemasaran produk*. Jurnal Ekonomi Digital, 2(2), 44–60.
- Lestari, S., & Widodo, B. (2020). *Analisis risiko kredit pada program dana bergulir*. Jurnal Manajemen Keuangan, 14(2), 155–168.
- Marzuki, M., & Fauziah, S. (2022). *Tantangan pendataan UMKM berbasis proposal dalam program pemerintah desa*. Jurnal Pembangunan Desa, 6(1), 33–42.
- Maulana, H., & Setyaningsih, S. (2021). *Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan kelompok*. Jurnal Abdimas Kreatif, 3(2), 45–56.
- Nasution, I., & Yuliani, R. (2021). *Model pengelolaan dana bergulir berbasis komunitas*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(1), 88–99.
- Prasetyo, A., & Utami, D. (2020). *Peran survei lapangan dalam validasi data penerima manfaat program pemerintah*. Jurnal Administrasi Sosial, 8(3), 120–130.
- Putri, A., & Aminah, S. (2022). *Faktor sosial dalam keberhasilan usaha mikro perempuan*. Jurnal Gender & Pemberdayaan, 9(2), 77–89.
- Rahmawati, S., & Cahyo, H. (2023). *Evaluasi pengelolaan BUMDes dalam mendukung ketahanan ekonomi desa*. Jurnal Manajemen Daerah, 5(1), 41–53.
- Sari, D., & Munawaroh, F. (2021). *Akuntabilitas dan transparansi dalam program pemberdayaan berbasis komunitas*. Jurnal Pemberdayaan Warga, 4(2), 66–78.
- Sudirman, Y., & Laili, F. (2024). *Dampak program dana bergulir terhadap peningkatan pendapatan UMKM*. Jurnal Ekonomi Sosial, 11(1), 25–39.
- Wulandari, M., & Ridho, F. (2023). *Peran kelompok sosial-keagamaan dalam penguatan ekonomi perempuan desa*. Jurnal Sosiologi Pembangunan, 4(2), 55–70.
- Yusuf, T., & Karim, M. (2020). *Pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan kapasitas pelaku UMKM desa*. Jurnal Abdimas Mandiri, 2(1), 17–28.